

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang : 2022-2023

Masa Persidangan : V

Rapat Ke : 10

Jenis Rapat : Rapat Kerja

: Menteri Agama RI Dengan

Sifat Rapat : Terbuka

: Senin, 5 Juni 2023 Hari, Tanggal

: Pukul 10.00 WIB Waktu

: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Tempat

Gedung Nusantara II lantai 1

Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan Acara

RKP Tahun 2024

Ketua Rapat : Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag

: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, SS., M.Si Sekretaris Rapat

: 1. 38 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; Hadir

2. Menteri Agama RI (H. Yaqut Cholil Qoumas);

3. Para Eselon I Kementerian Agama RI beserta Jajarannya.

PENDAHULUAN: 1.

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. dan didampingi oleh para Wakil Ketua Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda: "Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2024 sebesar Rp72.166.256.418.000,- (*Tujuh Puluh Dua Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), dengan rincian berdasarkan Unit Eselon I sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Jumlah (dalam ribu rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	30.891.461.372
2	Inspektorat Jenderal	177.213.825
3	Ditjen Bimas Islam	2.319.214.011
4	Ditjen Pendidikan Islam	34.572.372.014
5	Ditjen Bimas Kristen	805.512.967
6	Ditjen Bimas Katolik	341.065.461
7	Ditjen Bimas Hindu	475.803.168
8	Ditjen Bimas Buddha	203.152.743
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.376.875.940
10	Badan Litbang dan Diklat	663.633.827
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	339.951.090
Total		72.166.256.418

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai pagu anggaran Kementerian Agama RI tersebut bersama pejabat Eselon I.

 Komisi VIII DPR RI memahami usulan penambahan anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2024 sebesar Rp16.430.906.538.000,- (Enam Belas Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian berdasarkan Unit Eselon I sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No.	Program	Nilai
1	Sekretariat Jenderal	1.774.245.944
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	983.072.535
3	Ditjen Pendidikan Islam	10.231.109.412

4	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.739.241.295
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	125.838.982
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	106.789.934
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	66.000.000
8	Ditjen Penyelenggaraan Haji & Umrah	221.881.727
9	Badan Litbang dan Diklat	135.872.158
10	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	1.046.854.551
JUMLAH		16.430.906.538

Pendalaman lebih lanjut mengenai usulan penambahan anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2024 tersebut akan dibahas bersama pejabat Eselon I.

- 3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran fungsi agama untuk memaksimalkan program moderasi beragama dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks toleransi beragama.
 - b. Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran kuota PIP dan KIP bagi pelajar dan mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama.
 - c. Melakukan peningkatan SDM, sarana dan prasarana maupun pembenahan kelembagaan BPJPH agar target produk halal tersertifikasi sebanyak 3 juta produk tahun 2024 dapat tercapai.
 - d. Menjaga kualitas pelayanan bagi jemaah haji terkait pemondokan, konsumsi, transportasi dan kesehatan termasuk peningkatan kinerja petugas haji.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan penanganan serius terhadap berbagai kekerasan verbal, fisik dan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan.
 - f. Melakukan evaluasi dan pembenahan terkait berbagai persyaratan pendirian lembaga pendidikan keagamaan agar dipermudah guna pemeratan pendidikan di berbagai daerah.
 - g. Menuntaskan permasalahan inpasing guru, kesejahteraan penyuluh agama, dosen honorer di PTKN dan PPPK agar bisa diselesaikan secara bertahap dan komprehensif.
 - h. Meningkatkan kapasitas produksi percetakan Alquran Kementerian Agama RI agar bisa didistribusikan ke berbagai daerah yang membutuhkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI WAKIL KETUA,

Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si.